

Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif

(Studi Pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013)

M RIZKY HAFIZ M

ADE ADRIANI

CHAIRINA

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

This study aims to determine the level of compliance with mandatory disclosure IFRS at statement of comprehensive income in bank companies, as well as to determine the effect of the structure of corporate governance to the level of compliance with the mandatory disclosure. Structure of corporate governance measured by the number of commissioners, the proportion of independent commissioners, the number of commissioners meetings, the number of audit committee members and the number of audit committee meetings.

Measurement of IFRS mandatory disclosure at statement of comprehensive income compliance level in this study using dichotomous method by using the items contained in the BAPEPAM Regulation Number VIII.G.7. These results indicate that the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS at statement of comprehensive income in the bank companies is 73,99%. The multiple regression test showed that structure of corporate governance affects the level of compliance with mandatory disclosure convergences of IFRS. Corporate governance structure variables that affect compliance is the number of commissioners and the proportion of independent commissioners. Other variables, namely the number of commissioners meetings, the number of audit committee members and the number of audit committee meetings had no effect on the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS at statement of comprehensive income.

Keywords: *structure of corporate governance, the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS, and bank companies.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sebagai anggota *The Group of Twenty* (G20 Forum) telah bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS (www.iaiglobal.or.id, 2010). *International Financial Reporting Standard* (IFRS) adalah suatu upaya untuk memperkuat pondasi keuangan global dan mencari solusi jangka panjang mengenai transparansi laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Gamayuni (2009), mencanangkan bahwa

Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau *fulladoption*. Pada tahun 2012 tersebut diharapkan Indonesia sudah mengadopsi keseluruhan IFRS.

Salah satu prinsip akuntansi adalah pengungkapan penuh (*full disclosure*), yang mana artinya bukan hanya menampilkan hal-hal yang baik saja, dan menyingkirkan bagian yang merugikan (Haryono, 2010). Pengungkapan dalam *annual report* merupakan salah satu isu penting di dunia pasar modal. Menurut Lynch (2000), laporan laba rugi merupakan bagian dari *annual report* yang paling dilihat *stakeholders* sebagai bahan pengambilan keputusan mereka. Laporan ini penting karena paling dapat menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode.

Industri perbankan dalam menjalankan aktivitas operasinya lebih banyak berhubungan dengan risiko jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur dan perusahaan lainnya. Agar pengungkapan dalam *annual report* mencukupi kebutuhan informasi para *stakeholders* dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukan adanya *corporate governance* (Suhardjanto *et al*, 2012). *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/ Pemilik Modal, Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2012).

Industri perbankan di Indonesia pernah mengalami beberapa kasus ketidakpatuhan dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Bank Lippo terbukti mengeluarkan tiga laporan keuangan yang berbeda pada tahun 2003 (www.merdeka.com, 2003). Kasus Bank Lippo menjadi contoh keengganan perbankan mengungkapkan besarnya laba yang diperoleh

perusahaan yang merupakan bagian dari *mandatory disclosure*. Manipulasi laporan keuangan tersebut salah satunya dikarenakan gagalnya pelaksanaan *corporate governance*.

Kasus lain yang pernah terjadi pada perbankan di Indonesia yaitu kasus pembekuan usaha Bank Global tahun 2004, kasus Bank Century pada tahun 2008, kasus pembobolan dana nasabah Citibank dan Bank Mega pada tahun 2011 yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan jabatan dan pencucian uang. Karenanya, penelitian terhadap tingkat kepatuhan perusahaan perbankan yang listing di BEI terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS relevan untuk dilakukan, mengingat pentingnya pengungkapan wajib didalam laporan keuangan bagi banyak pihak dan dengan adanya penerapan konvergensi IFRS diharapkan kandungan kualitas informasi pada laporan keuangan menjadi lebih tinggi dan menghasilkan transparansi bagi para penggunanya (Gamayuni, 2009).

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* pada tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS di luar negeri sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain: Hossain (2008) di India, Al-Akra *et al.*, (2010) di Yordania dan Al-Mutawaa *et al* (2010) di Kuwait. Sementara itu di Indonesia penelitian yang pernah dilakukan adalah oleh Prawinandi *et al.*, (2012) dan oleh Utami *et al.*, (2012).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS memunculkan hasil yang beragam. Hossain (2008) menghasilkan temuan bahwa *size*, *profitabilitas* dan komposisi dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan. Dalam penelitian Al-Mutawaa (2010) juga menghasilkan temuan yang hampir sama dimana *size* perusahaan dan jenis industri berpengaruh pada tingkat pengungkapan wajib IFRS namun profitabilitas tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

Al-Akra (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Temuan berbeda dihasilkan dalam penelitian Prawinandi *et al.*,(2012) dimana jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS, tetapi proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Namun penelitian Utami *et al.*, (2012) menunjukkan temuan yang berbeda dimana hasil penelitiannya membuktikan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Penelitian ini dilatarbelakangi motivasi bahwa penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS belum banyak dilakukan di Indonesia. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi bidang teori akuntansi keuangan khususnya menguji teori agensi serta untuk menguji pengaruh struktur *corporate governance* yang didalam penelitian ini diprosikan oleh jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Teori Agensi

Ketika terdapat pemisahan antara pemilik (*principal*) dan manajer (agen) di suatu perusahaan maka terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Ketika pemilik (atau manajer) mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, terdapat

hubungan keagenan antara kedua pihak (Pierce, 2008). Teori agensi membaca kecenderungan bahwa apabila semakin banyak para pihak yang menyerahkan kesejahteraan untuk dikelola pihak lain, maka kepercayaan antara pemilik perusahaan dengan pengelolanya harus dijaga dan dijunjung tinggi (Subroto, 2005;1).

Penggunaan teori agensi relevan untuk penelitian ini karena teori agensi menganggap adanya perbedaan kepentingan antara agen dengan pemilik, sementara *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009).

2. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) Konvergensi IFRS

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono, 2005). Pengungkapan wajib bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dengan cara memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010). Informasi yang diungkapkan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka-angka dalam laporan keuangan.

Mandatory disclosure dalam laporan keuangan juga telah diatur standar akuntansi internasional IFRS. Terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan penerapan IFRS. Menurut Baskerville (2010) konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standarisasi, namun harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batas tingkat keberagaman. Jika dikaitkan

dengan IFRS, maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS.

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BAPEPAM-LK mendukung konvergensiPSAK ke IFRS karena sejalan dengan kesepakatan pemimpin-pemimpin negara yang tergabung dalam G20 seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. BAPEPAM-LK merevisi beberapa peraturan yang tidak sejalan dengan PSAK berbasis IAS/IFRS, diantaranya adalah; (1) Peraturan VIII.G.7 tentang pedoman pelaporan keuangan, (2) SE No. 02 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, (3) Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

3. Laporan Laba Rugi Komprehensif Setelah Konvergensi IFRS

Konvergensi IFRS mengakibatkan adanya perbedaan dalam hal penyajian laporan laba rugi komprehensif. Berdasarkan PSAK No. 1 (revisi 1998), perusahaan hanya diwajibkan untuk menyusun laporan laba rugi sementara menurut PSAK No. 1 (revisi 2009), perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan laba rugi komprehensif. Untuk itu, perusahaan wajib mencantumkan komponen pendapatan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif yang disusunnya. Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan laba rugi komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh SAK. Pendapatan komprehensif berarti seluruh perubahan ekuitas pemilik perusahaan diluar dari transaksi kontribusi atau distribusi dari dan kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagaimana pemilik perusahaan (Pratiwi *et al.*, 2012).

Pratiwi *et al.*, (2012) menyatakan selain munculnya pendapatan komprehensif lain, dalam laporan laba rugi komprehensif pos luar biasa tidak lagi diperbolehkan, karena terdapat anggapan bahwa semua kejadian di dunia adalah biasa dan seharusnya dapat dikendalikan

oleh manajemen melalui manajemen risiko. Sehingga, jika sebelumnya masih disajikan pos luar biasa dalam komponen laporan laba rugi, maka berdasarkan PSAK No.1 (revisi 2009) entitas tidak lagi diperkenankan menyajikan pos-pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif.

Eliza (2012) mengungkapkan bahwa dalam laporan laba rugi komprehensif, komponen laba untuk kepentingan nonpengendali tidak lagi disajikan sebagai pengurang laba. Setelah penyajian informasi total laba entitas, maka entitas wajib menyajikan informasi mengenai bagian laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan bagian laba yang dapat diatribusikan kepentingan nonpengendali. Dalam hal penyesuaian reklasifikasi, entitas dapat menyajikan informasi tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan.

4. Struktur *Corporate Governance*

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Sutedi (2012) terdapat unsur-unsur *corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan (dan yang selalu diperlukan di dalam perusahaan) serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan diluar perusahaan) yang bisa menjamin terlaksananya *good corporate governance*. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) menyebutkan bahwa inti dari *corporate governance* di Indonesia ada pada dewan komisaris, sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris, yaitu komite audit.

5. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Dalam kerangka *corporate governance* komisaris ditugaskan menjamin pelaksanaan strategis, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Sutedi, 2012). Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Dalam hal ini manajemen perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajemen dan memantau kinerja *Chief Executif Officer* (CEO) sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H1: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

b. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Kep-305/BEJ/07-2004 yang mengatur agar perusahaan yang *listing* di bursa mempunyai komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Keberadaan Komisaris Independen dipandang lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan suatu perusahaan dengan menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam hal meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, proporsi komisaris independen memegang peran

penting dalam perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

c. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG (2006) dan Analisis Pelaksanaan dan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik (BAPEPAM-LK, 2010) rapat dewan komisaris diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. Dalam hal ini, kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris akan dapat dilihat efektivitasnya melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang secara rutin diadakan. Hal ini dilakukan agar dewan komisaris dapat terus memantau kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi terhadap investor. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H3: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

d. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang perlu

disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Dalam praktik *corporate governance*, teori agensi mensyaratkan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini anggota komite audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, semakin besar jumlah anggota komite audit maka akan semakin mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H4: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

e. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Dalam Peraturan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Hal ini menyiratkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan agar dapat memantau tugas dan fungsi dari Komite Audit tersebut. Teori agensi mensyaratkan pengungkapan yang lengkap dan jelas dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, agar dapat memberikan transparansi dalam laporan keuangan maka perlu didukung oleh adanya agenda program kerja tahunan dari komite audit serta keteraturan rapat yang diadakan oleh komite audit. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas, yaitu:

H5: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang diwakili oleh data *annual report* perusahaan. Target populasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2012 sampai dengan 2013. Berdasarkan kriteria tersebut maka terpilih 32 perusahaan sebagai target populasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari *annual report* yang dikumpulkan dan diperoleh melalui situs www.idx.co.id dan dari situs masing-masing perusahaan perbankan yang *listing* di BEI pada tahun 2012 dan 2013.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Variable Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan menggunakan *checklist* pengungkapan wajib yang diwajibkan berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan seperti yang dilakukan oleh Rudy (2013).

Pengukuran menggunakan teknik *scoring*, yaitu jika item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, Pengukuran skor pengungkapan wajib dilakukan dengan rumus dari Prawinandi *et al* (2012) sebagai berikut:

$$\text{MANDSCRBY} = \frac{\sum \text{SCRBY}}{\sum \text{MAXBY}} \times 100\%$$

MANDSCRBY = Pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan B pada tahun Y,

SCRBY = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan B pada tahun Y,

MAXBY = Nilai maksimum yang dapat dicapai perusahaan B pada tahun Y.

b. Variable Independen (X)

1). Jumlah Anggota Dewan Komisaris (X1)

Jumlah anggota dewan komisaris adalah banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan jumlah komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan) dengan perusahaan (KNKG, 2006).

2). Proporsi Komisaris Independen (X2)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Penelitian ini menggunakan indikator sesuai dengan penelitian Suhardjanto dan Dewi dalam Utami *et al* (2012), yaitu menggunakan proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

3). Jumlah Rapat Dewan Komisaris (X3)

Menurut *Corporate Governance Guidelines* dalam Utami *et al.* (2012), dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan tetap dan dapat dilakukan pertemuan tambahan

sesuai dengan kebutuhan. Dewan Komisaris mengadakan pertemuan setidaknya satu kali dalam setiap bulan.

4) Jumlah Anggota Komite Audit (X4)

Komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (BAPEPAM-LK, 2010). Pada penelitian ini indikator untuk mengukur jumlah anggota komite audit sesuai dengan penelitian Prawinandi *et al.* (2012), yaitu jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

5). Jumlah Rapat Komite Audit (X5)

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan Peraturan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 menyebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Kent, Stewart dalam Utami *et al.* (2012), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS versi 17. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha_0 + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + bX_5 + e$$

Notasi:

Y = Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS
X1 = Jumlah anggota Dewan Komisaris

X2 = Proporsi Komisaris Independen

X3 = Jumlah Anggota Komite Audit

X4 = Jumlah Rapat Dewan Komisaris

X5 = Jumlah Rapat Komite Audit

α_0 = Konstanta

e = error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data

Hasil statistik deskriptif yang menggambarkan variabel struktur *corporate governance* disajikan dalam tabel 1 berikut,

(insert tabel 1)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan perbankan dalam penelitian ini telah mematuhi peraturan terkait *corporate governance* yang berlaku di Indonesia, antara lain memiliki jumlah anggota dewan komisaris minimal 1 orang, memiliki proporsi komisaris independen minimum 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris, memiliki jumlah anggota komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang.

Hasil statistik deskriptif yang menggambarkan variabel tingkat pengungkapan wajib disajikan dalam tabel 2 berikut,

(insert tabel 2)

Tabel 2 menunjukkan nilai tertinggi tingkat pengungkapan wajib berdasarkan Bapepam Peraturan Nomor VIII.G.7 pada perusahaan perbankan adalah sebesar 85%, sementara nilai terendah adalah sebesar 60%. Jika dilihat dari nilai rata-rata tingkat pengungkapan wajib yang sebesar 74,9%, maka ada 25 perusahaan atau 39% perusahaan yang memiliki nilai dibawah rata-rata, dan ada 39 perusahaan atau 61% perusahaan yang memiliki nilai diatas rata-rata. Nilai modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 85%. Standar deviasi pada tingkat pengungkapan wajib adalah 7,96.

Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian regresi telah dilakukan uji asumsi klasik dan hasilnya menunjukkan bahwa semua kriteria uji asumsi klasik telah terpenuhi. Tabel 3 berikut ini merupakan hasil analisis regresi menggunakan program IBM SPSS 17 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%.

(insert tabel 3)

1. Variabel Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Penelitian ini membuktikan nilai sig. (0,000) < α (0,05), maka berada di daerah penerimaan hipotesis alternatif H_1 , bukan di daerah penerimaan H_0 . Artinya, variabel jumlah anggota dewan komisaris signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif dengan tingkat kepercayaan 95%.

Menurut teori, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan (Sutedi, 2012). Muntoro (2006) menyebutkan, ukuran dewan komisaris dapat membantu meningkatkan keefektifan kerja dewan komisaris dan ukuran yang tidak seimbang dengan jumlah direksi yang lebih banyak yang akan menyebabkan komisaris kesulitan ketika bernegosiasi dengan dewan direksi. Berdasarkan alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris yang besar dapat menekan manajemen untuk lebih memperluas pengungkapan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Akra *et al.* (2010) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

2. Variabel Proporsi Komisaris Independen

Penelitian ini membuktikan nilai sig. (0,023) < α (0,05), maka berada di daerah penerimaan hipotesis alternatif H_2 , bukan di daerah penerimaan H_0 . Artinya, variabel proporsi komisaris independen signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif dengan tingkat kepercayaan 95%.

Effendi (2009) mengungkapkan komisaris independen diharapkan akan menjadi penggerak *good corporate governance* telah menjadi bagian dari reformasi kehidupan bisnis di Indonesia. Keberadaan komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis). Dengan semakin besar proporsikomisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007).

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

3. Variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Penelitian ini membuktikan nilai sig. (0,776) > α (0,05), maka berada di daerah penerimaan hipotesis nol H_0 , bukan di daerah penerimaan H_3 . Artinya, variabel jumlah rapat dewan komisaris tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif dengan tingkat kepercayaan 95%.

Kinerja yang dilakukan oleh dewan komisaris akan dapat dilihat efektivitasnya melalui kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat yang secara rutin diadakan.

Efektivitas rapat dewan komisaris penting untuk memonitor perusahaan. Namun apabila dalam rapat terdapat komisaris yang mendominasi dan hanya mementingkan kepentingan pribadi maka jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan (Utami *et al.*, 2012). Ditolaknya hipotesis 3 juga dapat dikarenakan rapat dewan komisaris dilakukan hanya sebagai formalitas dan tidak membahas permasalahan secara mendetail sehingga rapat tidak efektif dalam membahas kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS (Suhardjanto, 2014).

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

4. Variabel Jumlah Anggota Komite Audit

Penelitian ini membuktikan nilai sig. (0,621) > α (0,05), maka berada di daerah penerimaan hipotesis nol H_0 , bukan di daerah penerimaan H_4 . Artinya, variabel jumlah anggota komite audit tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif dengan tingkat kepercayaan 95%.

Komite audit perbankan dapat dipandang sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan. Komite audit harus bersikap adil dalam pengambilan keputusan, hal ini di tujukan kepada semua pihak, terutama dalam penelaahan kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi direksi. Menurut Sutedi (2011), pertanyaan timbul sehubungan dengan hal tersebut diatas ialah, bagaimana dengan komite audit yang di tunjuk perusahaan, apakah benar-benar mampu dan dapat bertindak secara kompeten dan independen. Pada praktiknya, sebagian besar komite audit perbankan ternyata tidak berjalan dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank yang

dilikuidasi. Salah satu penyebab timbulnya kebangkrutan bank tersebut adalah belum diterapkannya *good corporate governance* serta kinerja komite audit perbankan yang belum efektif (Effendi, 2009).

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

5. Variabel Jumlah Rapat Komite Audit

Penelitian ini membuktikan nilai sig. (0,231) > α (0,05), maka berada di daerah penerimaan hipotesis nol H_0 , bukan di daerah penerimaan H_5 . Artinya, variabel jumlah rapat komite audit tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hipotesis 5 ditolak dimungkinkan karena rapat/ pertemuan komite audit dalam pelaksanaannya memiliki kemungkinan jarang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihak manajemen maupun auditor eksternal sehingga masalah-masalah yang terdapat dalam proses pelaporan keuangan tidak terungkap dan tidak diketahui oleh komite audit (Utami *et al.*, 2012). Pelaksanaan jumlah rapat komite audit juga dimungkinkan hanya sekedar untuk memenuhi peraturan Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 dimana komite audit secara berkala melakukan rapat paling kurang satu kali dalam tiga bulan, hal ini terbukti dari jumlah modus pada statistik deskriptif rapat dewan komisaris yang sebesar empat kali dalam setahun.

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al.* (2012) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

E. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan menunjukkan kesimpulan jumlah anggota dewan komisaris dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hal ini memberikan arti bahwa dengan bertambahnya jumlah anggota dewan komisaris maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan mampu berjalan dengan baik. Begitu juga dengan jumlah proporsi komisaris independen dalam perusahaan. Hal ini memberikan arti bahwa dengan semakin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini disadari mempunyai beberapa keterbatasan yaitu: Variabel struktur *corporate governance* dalam penelitian ini hanya diukur berdasarkan dua unsur *corporate governance* yaitu dewan komisaris dan komite audit. Perusahaan perbankan yang menjadi target penelitian hanya berjumlah 32 perusahaan selama 2 tahun pengamatan (2012-2013) dengan jumlah sebanyak 64 data pengamatan saja. Penggunaan data yang digunakan, diperoleh hanya dengan cara dokumentasi, dengan cara *men-download* dari *website* Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak semua informasi bisa diperoleh oleh peneliti.

Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib perusahaan. Melalui hasil penelitian ini juga diharapkan perusahaan perbankan terdaftar di bursa efek dapat memenuhi tingkat pengungkapan wajib pada laporan laba rugi komprehensif seperti yang telah ditentukan oleh Bapepam-LK, karena laporan laba rugi komprehensif merupakan salah satu informasi penting bagi investor. Serta bagi investor sendiri yang akan

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan harus lebih memperhatikan tingkat pengungkapan oleh perusahaan karena pada akhirnya hal ini akan berdampak terhadap para pemegang saham di perusahaan.

Daftar Pustaka

- Al-Akra, M., I.A. Eddie dan M.J. Ali. 2010. *The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan*. *The British Accounting Review* 42: 170-186
- Al-Mutawaa, A. dan A.M. Hewaidy. 2010. *Disclosure Level and Compliance with IFRSs: An Empirical Investigation of Kuwaiti Companies*. *The International Business and Economics Research Journal Volume 9 No 5*: 33-50
- Abdul Rohman. 2008. Kajian Terhadap Perbedaan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Surat Edaran Bapepam No. 02 Tahun 2002 Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 1 No. 1*: 13-28.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2004 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas.
- _____. 2006. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
- _____. 2010. Analisis Pelaksanaan dan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik
- _____. 2010. Kajian tentang Pedoman *Good Corporate Governance* di Negara-negara Anggota ACMF.
- _____. 2010. Siaran Pers Sosialisasi Emiten tentang Sosialisasi PSAK berbasis IAS/IFRS.
- _____. 2012. Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- _____. 2012. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- _____. 2012. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-SE/17/BL/2012 tentang Penggunaan *Checklist* Pengungkapan Laporan Keuangan untuk Seluruh Industri di Pasar Modal di Indonesia.
- Effendi, M. A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eliza, A. 2012. Tinjauan Atas PSAK No.1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dan Perbedaannya dengan PSAK No.1 (Revisi 1998). *Jurnal Ilmiah ESAI Vol 6 No 2*: 1-8
- Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI). 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance*.

- Gamayuni, R. R. 2009. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju *International Financial Reporting Standards*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 14 (2): 153-166.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Haryono, Al. Jusup. 2010. Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 Edisi 6. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Haymans, DR. Adler Manurung. 2006. Cara Menilai Perusahaan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2006. Pedoman Umum *Good Corporate Governance*
- Lynch, M. 2000. *How to Read A Financial Reports*. New Brunswick: Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
- Muchlis, S. 2011. Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional dan Dampak Penerapan dari Adopsi Penuh IFRS di Indonesia. Jurnal Assets Volume 1 No 2: 191-206
- Mulyadi, 2001. Akuntansi Manajemen: Konsep Manfaat dan Rekayas, Edisi Ketiga. Jakarta Salemba: Empat.
- Muntoro, R.K. 2006. Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif. Artikel Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nasution, M., dan D. Setiawan. 2007. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar: 1-26.
- Nurkhin, Ahmad. 2009. *Corporate Governance* dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Pierce, R. 2008. Manajemen Strategis 1 (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Prawinandi, W., D. Suhardjanto dan H. Triatmoko. 2012. Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar: 1-26.
- Pratiwi, E., R. Indriani dan P. P. Midiastuty. 2012. "Relevansi Nilai Informasi Laporan Keuangan dan Komponen Laba Rugi Komprehensif dalam Menjelaskan Harga dan Return Saham". Forum Bisnis & Keuangan I: 289-307.
- Rudy, 2013. "Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan Setelah Penerapan PSAK berbasis IFRS (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)". Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Lampung.
- Soetedjo, S. 2009. Pengantar Akuntansi Proses Akuntansi Perusahaan Jasa. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.
- Subroto, Bambang S. R. 2005. *Corporate Governance or Good Corruption Governance?*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D. dan A. Dewi. 2011. Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15(1): 105-118.
- Suhardjanto, D., A. Dewi., Erna R., dan Firazonia M. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Dalam Praktik *Risk Disclosure* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol:9 No:1 16-30
- Suhardjanto, D., Edi Supriyono dan Akhmad Abdul Mustaqim. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS* di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok: 1-26
- Suta, A.Y dan Laksito, H. 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010”. *Diponegoro Journal of Accounting* 1: 1-15.
- Suparjan A., Hamzah dan M Zilal. 2009. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap Struktur Modal. *Media Riset Akuntansi Auditing* Vol 9 No 1: 1-18
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surya, R. A. Satriawan. 2012. Akuntansi Keuangan Versi IFRS. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwardjono. 2009. Teori Akuntansi: Perekrayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE
- Ujiyantho, H. A., dan B. A. Pramuka. 2007. Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar: 1-26
- Utami, Suhardjanto, dan Hartoko. 2012. Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan mekanisme *Corporate Governance*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar: 1-26.

Lampiran

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Struktur *Corporate Governance* (X)

No.	Komponen Variabel yang Diteliti	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-Rata	Modus	Standar Deviasi
1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris	9	2	5	3	1,84
2	Proporsi Komisaris Independen	100	50	59,64	50	11,00
3	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	57	0	15	4	16,54
4	Jumlah Anggota Komite Audit	8	3	4	3	1,36
5	Jumlah Rapat Komite Audit	38	4	13	4	8,43

Sumber: Data diolah kembali

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pengungkapan Wajib (Y)

No.	Komponen Variabel yang Diteliti	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	Rata-Rata	Modus	Standar Deviasi
1	Tingkat Pengungkapan Wajib	60	85	74,9	85	7,96

Sumber: Data diolah kembali

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	47.037	6.611		7.114	0.000
Jumlah Dewan Komisaris	3.065	0.692	0.696	4.427	0.000
Proporsi Komisaris Independen	0.202	0.087	0.276	2.329	0.023
Jumlah Rapat Dewan Komisaris	-0.016	0.054	-0.032	-0.286	0.776
Jumlah Anggota Komite Audit	-0.339	0.801	-0.067	-0.498	0.621
Jumlah Rapat Komite Audit	0.135	0.111	0.141	1.211	0.231

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan Wajib

(Sumber: Data diolah kembali)